

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Huala Adolf. *Aspek-Aspek Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara*, Refika Aditam, Bandung, 2019.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2018.

———. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Rajawali Press, Jakarta, 2020.

Ikrar Nusa Bakhti. *Hubungan Sipil-Militer dan Reformasi Demokrasi di Indonesia*, Obor Indonesia, Jakarta, 2019.

Bivitri susanti. *State Capture dan Pelemahan Demokrasi*, LP3ES, Jakarta, 2020

Firdaus, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Rajawali Press, Depok, 2021.

Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional Republik, *Kajian Strategis Ketahanan Nasional dan Keamanan Negara*, Lemhannas RI, Jarkata, 2021.

Maria Farida Indarti. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Kanisius, 2019.

Saldi Isra, *Demokrasi dan Konstitusi: Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Jakarta, 2023.

———. *Demokrasi dan Konstitusi: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Rajawali Press, Jakarta, 2022.

———. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Rajawali Press, Depok, 2020.

———. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Pemerintah dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2018.

Hikmahanto Juwana. *Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Mark Bovens, Thomas Schillemans, dan Robert E. Goodin (eds.). *The Oxford Handbook of Public Accountability*, Oxford University Press, Oxford, 2019

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2022.

Muradi. *Tata Kelola Pertahanan dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021.

Enny Nurbaningsih, *Problematisa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Aktualisasi Asas-Asas Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2022.

Indria Semego. *Demokrasi, Keamanan, dan Reformasi Sektor Pertahanan di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2019.

———. *Sengketa Informasi Publik dan Hak Warga Negara*, Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2019.

Soeprapto, dan Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta, n.d

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

B. Peraturan perundang-undangan

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia No.3 Tahun 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja (2020).

Rakyat, Majelis Permusyawaratan, dan Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Dasar 1945 asli.

Undang-undang no. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

C. Jurnal

Angga Prastyo, Samsul Wahidin, dan Supriyadi. 2020, "Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No. 2, hlm 125-127

Anggono, dan Bayu Dwi, 2020, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1, hlm. 13

Ardianto, Wildan Budi, dan Zacky Rayhan Ramadhan. 2025 “Keterlibatan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang : Tinjauan Normatif terhadap Proses Legislasi Undang-Undang TNI” *Jurnal Reverendum*, Vol. 2, No. 4 November (2025)

Haqq, Luna Dezeana Ticoalu dan Ahmad Ghiffari Rizqul. 2024, “Pemenuhan Meaningful Participation dalam Rangka Mewujudkan Procedural Justice Terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 2, 187–89

Susi Dwi Harijanti. 2020, “Kerahasiaan Negara dan Keterbukaan Informasi dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis.” *Jurnal Konstitusi* 2, Vol. 17, No. 4, hlm. 689–690

———. “Kerahasiaan Negara dan Keterbukaan Informasi dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, hlm. 692, 2020.

Hayat. 2020, “Partisipasi dan Deliberasi Publik dalam Proses Pembentukan Kebijakan.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3, hlm. 313

Ni’matul Huda. 2018, “Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, hlm. 38

Eko Noer Kristiyanto. 2019, “Keterbukaan Informasi Publik dan Batasan Rahasia Negara dalam Negara Demokratis.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 1 hlm. 104

———. “Keterbukaan Informasi Publik dan Batasan Rahasia Negara dalam Negara Demokratis.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 1, hlm. 104.

Kurniawan, Muhammad Erik, dan Anggrio Shane Gerard. 2025, “Problematisasi Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara : Antara Reformasi Sektor Keamanan Dan Ancaman Militerisme” *Jurnal Multilingual*, Vol. 5, No. 1, hlm. 455

Hadyan Iman Prasetya. 2023, “The Law of Lawmaking as Quasi Constitutional Legislation: Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Legislasi Kuasi Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 1 hlm. 40–41

Angga Prasetyo. 2022, "Indonesia Limitation Of Meaningful Participation Requirements In The Indonesian Law-." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 3, hlm .112

Ria Casmi Arrsa, 2022, "Meaningful Participation sebagai Prinsip Pembentukan Undang-Undang yang Demokratis." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1, hlm. 58

Alamsyah Saragih, 2016 "Penerapan Prinsip Maximum Access Limited Exemption dalam Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5, No. 2, hlm. 150

M. Nur. Solikhin, 2022, "Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Legislasi dalam Negara Demokras." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2, hlm. 175

Suhendarto, dan Bonaventura Pradana. 2022, "Konsep Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, Vol. 19, No. 4, hlm. 518

Dian Susantini, 2026, "Kajian Undang-Undang TNI Nomor 03 Tahun 2025 dan Stabilitas Negara Dalam Perspektif Legitimasi Bangsa dan Hukum," *Jurnal SAINMIKUM*, Vol. 3, No. 1, hlm. 20

D. Report

Indonesia, Amnesty International. "Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia," 2022

is Gindarsah dan Adhi Wiratmoko. Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2017

Note, *Policy Briefing*. "Fair Market Conditions for Competitiveness in the Adriatic Region OECD Recommendation on Open Government 2017 OECD Recommendation on Open Government," n.d